



# A-N-T-I

Aliansi Nasional Timor-Leste Untuk Pengadilan Internasional  
*The Timor-Leste National Alliance for an International Tribunal*

Sekretariatu; Asosiasaun HAK  
Rua Gov. Serpa Rosa  
T-091, Faról, Dili, Timor-Leste  
Tel: +670-3321040 or +67077289241 or 77367518 / 77179655  
e-mail: [lanarra.del@gmail.com](mailto:lanarra.del@gmail.com) or [atino@laohamutuk.org](mailto:atino@laohamutuk.org)  
Website: [www.laohamutuk.org/www.jsmp/www.haktl.org](http://www.laohamutuk.org/www.jsmp/www.haktl.org)

**Selamat Datang Bapak SBY di Timor Leste!**  
**“Jangan Mencuci tangan atas Kejahatan Kemanusiaan dari 1975-1999 di Timor Leste”**

Berdasarkan informasi resmi dari “*Pagina Governu Timor Leste*” bahwa pada 26-27 Agustus 2014, sesuai dengan undangan dari Pemerintah Timor Leste, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudiono (SBY) akan berkunjung ke Timor Leste. Dalam kunjungannya itu kemungkinan agenda yang akan dibicarakan dengan pemimpin Timor Leste mengenai perbatasan, taman makam pahlawan militer Indonesia dan para pemimpin Timor Leste yang hilang dibawah atau bahkan dibunuh oleh militer Indonesia, sebagaimana diberitakan oleh media online di situs (<http://www.timorhauniandoben.com/2014/07/vizita-ultimu-sby-posibilidadehatudu.html>).

Berkeanaan dengan kunjungan Bapak SBY ANTI menyampaikan “Selamat Datang” dan menyatakan kepada publik perihal keterlibatan SBY di bawah rezim “Orde Baru Soeharo”. Sebagaimana publik ketahui bahwa Susilo Bambang Yudiono sebagai komandan militer yang juga ambil bagian dalam pendudukan ilegal, membunuh dan menyengsarakan rakyat Timor-Leste selamat 24 tahun. Selama pendudukan ilegal ini, militer Indonesia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste secara sistematis dan terencana. Berdasarkan laporan “*Chega...!*” militer Indonesia terlibat tindakan pembunuhan dan penghilangan paksa mencapai sekitar 18,600 dengan dukungan dari komunitas internasional.

Masyarakat sipil yang meninggal dunia dengan berbagai cara; ada yang dibom, sebagian disiksa, diculik dan sebagai akibat mati kelaparan karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian mereka.

Setelah Timor-Leste lepas dari Indonesia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membentuk sebuah Unit untuk Kejahatan Berat-dan Sebuah Unit Khusus untuk menginvestigasi, mendakwa dan mengadili para pelaku kejahatan yang terlibat atas kejahatan kemanusiaan selama tahun 1999 (tidak termasuk kejahatan kemanusiaan periode

1975-1999). Hasil dari dua mekanisme peradilan ini membuktikan bahwa para pelaku kejahatan kemanusiaan yang diproses di pengadilan Ad hoc-Jakarta hanya merupakan upaya untuk mencuci tangan, dan bukan merupakan sebuah proses peradilan yang murni untuk kepentingan keadilan. Proses persidangan tersebut juga mendapat tekanan dari para otoritas di Indonesia dan Indonesia tidak menunjukkan kerjasama yang baik dengan proses tersebut.

PBB mendirikan sebuah Komisi Penyelidikan untuk menilai hasil kerja mengenai proses kejahatan berat tersebut di Indonesia dan Timor Leste. Dari semua komisi merekomendasikan bahwa PBB perlu mengambil sebuah langkah konkrit untuk mendirikan Pengadilan Internasional untuk kejahatan berat, apabila Pemerintah Indonesia tetap menghambat dijalankannya sebuah proses hukum yang adil. Akan tetapi hingga saat ini komunitas internasional dan PBB belum mengambil langkah tersebut untuk mencari solusi atas kasus kejahatan berat selama periode pendudukan ilegal tersebut. Untuk menjawab tuntutan didirikannya pengadilan internasional, Pemerintah Indonesia meminta untuk mendirikan sebuah pengadilan *Ad-hoc* dengan tujuan mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Sebagai Presiden Republik Indonesia untuk dua periode di Indonesia, SBY gagal mencari solusi atas kasus kejahatan kemanusiaan. SBY gagal menerapkan rekomendasi dari semua laporan termasuk gagal mendirikan sebuah Komisi Nasional untuk mencari anak-anak Timor-Leste yang hilang selama pendudukan sebagaimana dalam laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan TL-RI (KKP). Hal ini menunjukkan bahwa SBY dan Pemerintah Indonesia tidak memiliki niat baik dan terus menghambat proses peradilan terhadap kejahatan kemanusiaan.

Para korban dan semua orang yang mencari keadilan untuk kejahatan kemanusiaan hingga saat ini terus menerus mencari dan menuntut Pemerintah Indonesia, Timor-Leste dan komunitas internasional untuk mengimplementasikan rekomendasi *Chega...!*, laporan KKP-HAM, Komisi Penyelidikan PBB, terutama rekomendasi tentang cara untuk memutuskan impunitas melalui sebuah peradilan terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan melalui sebuah Pengadilan Internasional yang adil dan kredibel.

Para korban juga menuntut negara-negara super power seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia dan semua negara yang memperoleh keuntungan dari pendudukan ini untuk mendukung dan mendorong proses bagaimana memutuskan impunitas dan mencari solusi agar memberikan keadilan kepada masyarakat Timor-Leste.

Selain itu ANTI juga menuntut pada Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk menunjukkan kemauan politik guna mencari solusi untuk kejahatan kemanusiaan selama pendudukan termasuk membentuk sebuah komisi nasional untuk mencari orang-orang termasuk anak-anak Timor-Leste yang dibawah secara paksa. "Laporan Ahli Komisi Penyelidikan PBB menyebutkan bahwa semua mekanisme yang didukung oleh PBB tidak ada pertanggungjawaban yang baik, oleh karena itu merekomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional yang adil dan kredibel.

**Fakta-fakta kejahatan kemanusiaan yang masih terus eksis dan berlanjut hingga saat ini:**

- Keluarga korban belum mengetahui keberadaan suami mereka, istri, anak yang dibawah paksa oleh militer Indonesia dan masih hilang hingga saat ini)
- Anak-anak yang dibawah oleh militer Indonesia hingga saat ini masih terpisah dengan orang tua mereka;
- Para aktor kejahatan kemanusiaan, hingga kini masih tetap menikmati kebebasan mereka di Indonesia

ANTI berharap bahwa semua pihak yang telah disebutkan dalam pernyataan ini, dapat menerima sikap kami.

Untuk informasi mengenai kejahatan berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat akses di alamat ini:

<http://www.laohamutuk.org/Justice/JusticeIndex.html#InternationalCrimes>,  
<http://www.haktl.org/ami-nia-programa/direitu-ba-justisa-krimi-pasadu/>

Dili, 22 Agustus 2014

Sisto dos Santos  
Koordinator Board ANTI